



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 12665-12674

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Perbandingan Sistem Media dan Politik di Negara Demokrasi Maju dan Berkembang

Sekar Ayu Fadhilah<sup>1</sup>, Eko Purwanto<sup>2</sup>, Anisa Fauziah<sup>3</sup>, Zahra Aidilia<sup>4</sup>, Rhisma Melati<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Tangerang

[sekarayu.fadhilah@umt.ac.id](mailto:sekarayu.fadhilah@umt.ac.id), [eko.purwanto@umt.ac.id](mailto:eko.purwanto@umt.ac.id), [nisaaafzh070605@gmail.com](mailto:nisaaafzh070605@gmail.com),

[zaahrraay@gmail.com](mailto:zaahrraay@gmail.com), [rhismamelati@gmail.com](mailto:rhismamelati@gmail.com)

### Abstrak

Hubungan antara media dan politik adalah suatu dinamika kompleks yang saling memengaruhi, diwarnai oleh persoalan bias politik, sensasionalisme, dan penggunaan framing secara strategis untuk melayani kepentingan elite kekuasaan. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki kemampuan besar dalam membentuk opini publik, menetapkan agenda, dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap realitas politik. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan sistem media dan politik di negara demokrasi maju dan negara demokrasi berkembang guna memahami variasi peran dan fungsi media dalam konteks yang berbeda. Negara-negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, umumnya memiliki sistem media yang relatif independen, didukung oleh regulasi yang kuat, profesionalisme jurnalisme, serta tingkat literasi media yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, media berperan sebagai watchdog demokrasi yang mengawasi kekuasaan dan mendorong akuntabilitas publik. Sebaliknya, negara-negara demokrasi berkembang, seperti Indonesia, menghadapi berbagai tantangan struktural seperti konsentrasi kepemilikan media pada kelompok elite tertentu, rendahnya literasi media, serta intervensi politik dan ekonomi yang memengaruhi independensi redaksional. Hal ini menyebabkan media terkadang terjebak dalam kepentingan ekonomi-politik atau berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana media dan politik saling memengaruhi di kedua konteks tersebut, serta merumuskan strategi untuk membangun ekosistem media yang sehat, independen, dan bertanggung jawab di negara demokrasi berkembang.

*Kata kunci: Demokrasi Berkembang; Demokrasi Maju; Sistem Media; Media Dan Politik*

### 1. Latar Belakang

Hubungan antara media dan politik sering kali dihadapkan pada berbagai masalah yang memengaruhi dinamika informasi, opini publik, dan proses politik itu sendiri. Media sering kali dikritik karena memiliki bias politik yang dapat memengaruhi cara penyajian berita dan opini yang disampaikan kepada masyarakat (Ritonga, 2023). Media kadang-kadang lebih cenderung mengutamakan aspek hiburan atau konten yang sensasional daripada memberikan liputan yang mendalam dan berimbang terhadap isu politik yang kompleks. Penguasaan terhadap bahasa melalui media menjadi instrumen strategis dalam praktik politik. Pemanfaatan bahasa bermakna ganda yang mendominasi ruang media massa berfungsi sebagai sarana untuk meminggirkan partisipasi masyarakat dan mengalihkan perhatian publik dari proses politik formal. Strategi ini secara implisit mendukung pelanggaran kekuasaan oleh elite politik sebagai aktor dominan dalam struktur kekuasaan (Aminah, 2021).

Media dan politik memiliki hubungan yang bersifat timbal balik serta saling memengaruhi dalam kehidupan demokratis. Asumsi yang mendasari adalah, pertama media adalah sebuah institusi dan aktor politik yang memiliki hak-hak. Kedua, media dapat memainkan berbagai peran politik, diantaranya mendukung proses transisi demokrasi, dan melakukan oposisi. Sebagaimana disinyalir oleh Cook, bahwa hal ini telah menjadi perhatian penting pada masyarakat Barat, di mana para jurnalis telah berhasil mendorong masyarakat untuk tidak melihat mereka sebagai aktor politik, sedangkan para pakar politik juga telah gagal untuk mengenali media sebagai sebuah institusi politik (Cook, 1998:4) dalam (Aminah, 2021).

Dalam hal ini, media bukan sekadar alat untuk menyampaikan pesan politik, melainkan juga tempat di mana berbagai kepentingan saling berkompetisi dalam wacana. (Irfan Haikal et al., 2024) menjelaskan bahwa interaksi antara media dan politik sangat dipengaruhi oleh sistem politik, budaya, dan tata kepemilikan media di setiap

negara. Oleh sebab itu, penting untuk memahami dinamika hubungan ini guna menjelaskan cara kerja sistem media dalam konteks demokrasi yang berbeda.

Dalam era globalisasi saat ini, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi untuk mendukung penyampaian aspirasi rakyat melalui media baru (Arsyad et al., 2024). Perbandingan antara sistem media dan politik di negara demokrasi maju dan berkembang menjadi penting karena keduanya memiliki konteks sosial, ekonomi, dan historis yang sangat berbeda. Negara dengan demokrasi maju seperti Amerika Serikat telah melalui proses panjang dalam membangun institusi demokratis yang stabil dan media yang relatif independen (Nasution & Suhairi, 2023). Media di negara-negara ini sering kali disebut sebagai "watchdog" atau anjing penjaga demokrasi, yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis dan objektif. Di sisi lain, negara demokrasi berkembang seperti Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti rendahnya literasi media, konsentrasi kepemilikan media, intervensi politik terhadap ruang redaksi, hingga lemahnya regulasi dalam melindungi kebebasan pers (Irsyahma & Lestarika, 2024). Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan langkah nyata untuk memperkuat integritas dan profesionalisme media massa di Indonesia. Regulasi yang ketat dan penegakan kode etik jurnalistik sangat penting bagi media untuk memenuhi perannya sebagai pendukung demokrasi. Edukasi media kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka bisa lebih kritis dalam menyaring informasi yang mereka terima (Melati et al., 2024).

Sistem media di negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat, ditandai oleh tingkat kebebasan pers yang tinggi, struktur kepemilikan yang plural, dan regulasi yang relatif longgar terhadap isi pemberitaan. Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana mayoritas rakyat dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya (Nasution & Suhairi, 2023). Media di Amerika memiliki fungsi sentral sebagai watchdog yang mengawasi jalannya pemerintahan, terutama dalam mengontrol kekuasaan eksekutif dan lembaga negara lainnya. Menurut McChesney (2021) dalam bukunya "Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy", sistem media di Amerika Serikat dibangun atas dasar prinsip libertarian press theory, di mana kebebasan berbicara dan independensi editorial dianggap sebagai fondasi utama dari demokrasi yang sehat.

Selain itu, sistem media di negara maju umumnya memiliki infrastruktur teknologi komunikasi yang maju dan literasi media yang tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini memungkinkan publik untuk lebih aktif dalam mengakses, menilai, dan berpartisipasi dalam wacana publik. (Humprecht et al., 2022) dalam bukunya yang berjudul "Correction to: Media Systems in the Digital Age: An Empirical Comparison of 30 Countries" menekankan bahwa dalam konteks digitalisasi, media di Amerika bertransformasi menjadi sistem informasi yang sangat kompetitif, di mana perusahaan besar seperti The New York Times, CNN, dan Washington Post tetap menjadi pemain dominan, tetapi bersaing ketat dengan media alternatif dan platform digital seperti Substack, YouTube News, dan X (Twitter).

Berbeda dengan negara maju, sistem media di negara demokrasi berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, politik, dan ekonomi yang signifikan. Media Indonesia secara formal telah memperoleh kebebasan pers sejak reformasi tahun 1998, namun kebebasan tersebut masih sering terbatas oleh kepentingan politik, konsentrasi kepemilikan, dan intervensi ekonomi (Melati et al., 2024). Dalam konteks negara berkembang, media sering kali tidak sepenuhnya bebas dan independen, melainkan terjatuh dalam kepentingan ekonomi-politik pemilik modal, atau bahkan menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan (Yunus & Ardiansyah, 2024). Sementara itu, sistem politik di negara berkembang cenderung masih dalam tahap konsolidasi, dengan institusi demokrasi yang belum sepenuhnya kuat dan partisipasi politik yang masih timpang (Suhardi, 2025). Hal ini menciptakan dinamika yang sangat berbeda dalam hubungan media dan politik dibandingkan dengan negara-negara maju. Misalnya, media di negara maju lebih cenderung mendorong transparansi dan akuntabilitas, sedangkan di negara berkembang, media terkadang justru menjadi saluran penyebaran propaganda atau berita palsu (Melati et al., 2024).

Selain itu, perkembangan media digital di Indonesia memperlihatkan dinamika baru. Di satu sisi, munculnya media alternatif dan jurnalisme warga memperluas ruang partisipasi publik; di sisi lain, penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Dalam penelitiannya, (Bulya & Izzati, 2024) menekankan bahwa rendahnya literasi digital di Indonesia menyebabkan masyarakat lebih mudah terpapar bias informasi dan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, sistem media di negara berkembang masih berupaya menyeimbangkan antara kebebasan, tanggung jawab sosial, dan kontrol politik yang sering kali tidak stabil.

Sistem media dan politik dari tingkat kematangan demokrasi sangat memengaruhi karakter dan independensi media di suatu negara. Di negara demokrasi maju, hubungan antara media dan kekuasaan politik cenderung bersifat adversarial, yaitu saling mengawasi dan mengontrol dalam kerangka keterbukaan publik. Hal ini terlihat

dari bagaimana media berperan aktif menjaga akuntabilitas pemerintah dan menjadi arena partisipasi politik warga (Melati et al., 2024). Sebaliknya, di negara demokrasi berkembang, sistem media masih sering menunjukkan pola hubungan patron-client di mana media bergantung pada elite politik dan ekonomi, sehingga independensinya terbatas (Yunus & Ardiansyah, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem media di negara demokrasi maju cenderung mendukung mekanisme checks and balances melalui media independen, sementara di negara berkembang media masih terperangkap dalam jaringan kepentingan politik dan ekonomi. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kekuatan demokrasi dan struktur media memiliki hubungan timbal balik: semakin matang sistem politik suatu negara, semakin besar peluang media untuk berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dan penopang nilai-nilai demokrasi.

Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan nilai-nilai, budaya politik, serta pola relasi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian komparatif yang tidak hanya memetakan perbedaan dan persamaan antara sistem media dan politik di kedua kategori negara tersebut, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penyebabnya serta implikasi jangka panjang terhadap kualitas demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana sistem media dan politik saling memengaruhi di negara demokrasi maju dan berkembang, dengan fokus pada aspek-aspek seperti kebebasan pers, peran media dalam pemilu, kepemilikan dan konsentrasi media, serta hubungan antara media dan elit politik. Dengan melakukan perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola struktural yang menjelaskan peran media dalam memperkuat atau justru melemahkan proses demokratisasi di berbagai konteks. Selain itu, pembahasan ini juga penting untuk merumuskan strategi ke depan dalam memperkuat ekosistem media yang sehat, independen, dan bertanggung jawab, khususnya di negara-negara demokrasi yang masih dalam tahap perkembangan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif (*comparative qualitative research*) dengan desain studi kasus berganda (*multiple case study design*). Tujuan utamanya adalah untuk melihat, membandingkan, dan memahami persamaan serta perbedaan penting antara dua kategori negara yang dipilih, yaitu negara demokrasi maju (Amerika Serikat) dan negara demokrasi berkembang (Indonesia).

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara sistem politik dan sistem media. Analisis diarahkan untuk melihat bagaimana karakteristik sistem politik seperti tingkat demokratisasi, stabilitas institusi, dan kebijakan kebebasan pers mempengaruhi bentuk serta fungsi sistem media. Sebaliknya, penelitian ini juga menelaah bagaimana independensi media, model kepemilikan, dan praktik komunikasi politik dapat memperkuat atau melemahkan kualitas demokrasi.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa media dan politik memiliki hubungan timbal balik yang kompleks, di mana sistem politik dapat menentukan ruang gerak media melalui kebijakan, regulasi, dan stabilitas institusional, sementara media dapat memengaruhi arah politik melalui pemberitaan, pembentukan opini publik, dan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola hubungan sebab-akibat antara karakteristik sistem politik dan karakteristik sistem media. Sistem politik dalam penelitian ini mencakup aspek tingkat demokratisasi, kebijakan kebebasan pers, dan stabilitas kelembagaan politik. Sementara itu, sistem media dilihat dari aspek independensi redaksi, kepemilikan dan konsentrasi media, serta praktik komunikasi politik yang dijalankan. Dengan memahami kedua aspek tersebut, penelitian ini berupaya menemukan hubungan konseptual yang menjelaskan bagaimana perbedaan dalam sistem politik dapat menghasilkan bentuk dan fungsi media yang berbeda pula, serta sejauh mana hal tersebut berpengaruh terhadap penguatan atau pelemahan demokrasi.

Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*), di mana data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel daring, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menemukan pola-pola konseptual dan hubungan antara sistem media dan sistem politik pada kedua kategori negara tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Miqzaqon T. dan Purwoko, penelitian kepustakaan adalah studi yang memanfaatkan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah sejarah, dan sebagainya, untuk mengumpulkan informasi dan data (Poltak & Widjaja, 2024).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini berfokus pada upaya memahami makna yang terkandung dalam data, bukan sekadar mengukur secara kuantitatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan mengabaikan data yang tidak berkaitan.

Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel perbandingan agar hubungan antar konsep dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menginterpretasikan hasil analisis untuk menemukan pola dan hubungan konseptual yang menjelaskan bagaimana sistem media dan sistem politik saling memengaruhi dalam konteks demokrasi maju dan berkembang.

Analisis dilakukan secara tematik dan komparatif. Artinya, setiap temuan dari Amerika Serikat dibandingkan dengan temuan dari Indonesia berdasarkan indikator tertentu, seperti tingkat kebebasan pers, independensi media, dan peran media dalam sistem politik. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pola hubungan yang bersifat universal maupun yang spesifik pada konteks masing-masing negara. Selain itu, desain studi kasus berganda digunakan untuk menghindari bias dari satu kasus tunggal dan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai variasi hubungan media-politik di berbagai konteks. Amerika Serikat berfungsi sebagai kasus yang mencerminkan kemapanan institusional dan tradisi kebebasan pers yang kuat, sementara Indonesia dijadikan sebagai kasus yang mencerminkan proses transisi dan konsolidasi demokrasi yang masih berlangsung.

Secara keseluruhan, penelitian ini menempuh beberapa tahapan yang meliputi perumusan masalah dan tujuan penelitian, pengumpulan data melalui studi literatur, analisis komparatif terhadap dua kasus negara, serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Melalui metode komparatif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara media dan politik di negara demokrasi maju dan berkembang, sekaligus menawarkan solusi konseptual untuk memperkuat peran media dalam proses demokratisasi di masa mendatang.

### **3. Hasil dan Diskusi**

#### **1. Gambaran Umum Sistem Media Dan Politik**

Sistem politik di negara maju dan berkembang berbeda secara signifikan dalam hal stabilitas politik, kualitas lembaga demokrasi, dan partisipasi masyarakat, yang semuanya sangat dipengaruhi oleh sistem media mereka. Di negara demokrasi maju, lembaga-lembaganya yang kuat biasanya mendukung kebebasan pers, sehingga memungkinkan diskusi publik yang lebih informatif dan meningkatkan akuntabilitas politik. Sebaliknya, di negara yang sedang mengembangkan demokrasi, sistem media mungkin masih dalam tahap pertumbuhan, dengan tingkat kontrol negara dan partisipasi publik yang bervariasi (Lindvall, 2025). Hubungan antara politik dan media terlihat jelas karena struktur politik memengaruhi kepemilikan dan kebijakan media, yang pada gilirannya memengaruhi cara informasi disebar dan dikonsumsi (Hobbs, 2025). Selain itu, media juga berperan penting dalam proses politik, misalnya memengaruhi perilaku pemilih dan pembuatan kebijakan melalui pengaturan agenda dan pembingkai isu, sekaligus mencerminkan suasana politik yang ada. Hubungan yang dinamis ini menekankan pentingnya media dalam mendorong keterlibatan publik dan stabilitas demokrasi, terutama saat terjadi perubahan sosiopolitik (Shi, 2023)

Tambahan ini juga dapat dipahami melalui cara media beroperasi sebagai institusi sosial yang memiliki logika tersendiri logika komersial, profesional, dan politik yang saling berinteraksi dalam membentuk ruang publik. Di negara demokrasi maju, profesionalisme jurnalistik umumnya lebih mapan: ada standar verifikasi, mekanisme koreksi, serta etika yang relatif ditegakkan melalui asosiasi profesi maupun pengawasan publik. Kondisi ini memperkuat fungsi media sebagai “watchdog” yang mengawasi kekuasaan, memfasilitasi debat kebijakan, dan menyediakan informasi yang memungkinkan warga membuat keputusan politik secara rasional. Namun, bahkan di negara maju, media tidak selalu netral; kepentingan ekonomi pemilik, polarisasi ideologis, serta kompetisi pasar dapat mendorong sensasionalisme atau selektivitas dalam pemberitaan. Akibatnya, kebebasan pers yang tinggi tidak otomatis menghasilkan kualitas informasi yang tinggi, melainkan bergantung pada integritas institusi media dan literasi publik yang menyertainya.

Sementara itu, di negara berkembang atau negara yang sedang mengalami konsolidasi demokrasi, tantangan media sering lebih kompleks karena lingkungan institusionalnya belum stabil. Kelemahan penegakan hukum, ketergantungan media pada iklan pemerintah, serta konsentrasi kepemilikan dapat memunculkan tekanan halus maupun tekanan langsung terhadap redaksi. Dalam situasi ini, media dapat terjebak antara peran idealnya sebagai pengawas kekuasaan dan kebutuhan pragmatis untuk bertahan hidup secara finansial. Variasi kontrol negara juga memengaruhi tingkat kebebasan informasi: di beberapa negara, regulasi dapat digunakan untuk melindungi publik dari disinformasi; namun di negara lain, regulasi yang sama bisa dipakai untuk membatasi kritik dan mengendalikan narasi politik (Lindvall, 2025). Dengan demikian, dinamika media-politik di negara berkembang bukan hanya soal “bebas” atau “tidak bebas,” melainkan soal konfigurasi kekuatan yang memengaruhi produksi dan distribusi informasi.

Perubahan teknologi digital semakin memperkuat keterkaitan media dan politik. Platform media sosial memperluas partisipasi politik dengan membuat warga lebih mudah mengomentari isu, mengorganisasi gerakan, dan membangun solidaritas lintas wilayah. Namun, ekosistem digital juga membawa masalah: misinformasi dan disinformasi dapat menyebar cepat, sementara algoritma platform cenderung mengutamakan konten yang memicu emosi sehingga memperkuat polarisasi. Dalam konteks ini, pengaturan agenda dan pembungkaman isu tidak lagi dimonopoli oleh media arus utama; aktor politik, influencer, dan komunitas daring ikut membentuk persepsi publik, sering kali dengan insentif yang berbeda dari jurnalisme profesional. Politik identitas dapat semakin mengeras ketika kelompok-kelompok hanya terpapar pada informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka, sehingga kualitas deliberasi publik menurun.

Selain memengaruhi opini dan perilaku pemilih, media juga berperan dalam legitimasi pemerintahan dan kepercayaan pada institusi demokrasi. Ketika media berhasil menghadirkan informasi yang kredibel dan seimbang, publik cenderung lebih percaya pada proses politik dan lebih bersedia menerima hasil pemilu atau kebijakan yang tidak selalu menguntungkan mereka. Sebaliknya, ketika media dipersepsikan partisan atau mudah dimanipulasi, ketidakpercayaan publik meningkat, yang dapat memicu apatisme politik atau bahkan konflik sosial. Karena itu, hubungan media dan politik perlu dilihat sebagai ekosistem: kualitas demokrasi dipengaruhi oleh interaksi antara struktur kepemilikan media, regulasi, etika jurnalistik, partisipasi warga, serta kemampuan masyarakat menilai informasi secara kritis (Hobbs, 2025). Pada saat terjadi perubahan sosiopolitik misalnya transisi kekuasaan, krisis ekonomi, atau konflik peran media semakin menentukan karena narasi yang dibangun dapat menenangkan situasi atau justru memperuncing ketegangan (Shi, 2023).

## 2. Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan bagian penting dari demokrasi, meskipun tingkatnya berbeda antara negara demokrasi maju dan yang sedang berkembang. Di negara maju, jurnalis dilindungi secara hukum melalui aturan seperti Undang-Undang Kebebasan Informasi, serta adanya lembaga independen seperti Dewan Pers yang membantu menjaga kebebasan berekspresi dan mendorong akuntabilitas pemerintah (de la Fuente, 2022). Sebaliknya, di demokrasi yang sedang berkembang, kebebasan pers sering terhambat oleh tekanan politik, sensor terselubung, dan kekerasan terhadap jurnalis, dengan pemerintah memanfaatkan tekanan ekonomi maupun non-fisik untuk mengontrol narasi media (Vannuchi et al., 2025). Perbedaan ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kematangan lembaga demokrasi dan tingkat kebebasan media, di mana pers yang bebas mendorong transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat proses demokratisasi (De la Mata et al., 2024). Dengan demikian, kebebasan pers dan demokrasi saling memengaruhi secara timbal balik.

Kebebasan pers tidak hanya dapat diukur dari ada atau tidaknya sensor langsung, tetapi juga dari kondisi struktural yang menentukan apakah jurnalis dan organisasi media mampu bekerja tanpa rasa takut serta tanpa ketergantungan yang merusak independensi editorial. Di negara demokrasi maju, perlindungan hukum yang kuat biasanya disertai dengan tradisi peradilan yang relatif independen, sehingga sengketa pers—misalnya terkait pencemaran nama baik atau akses informasi publik lebih sering diselesaikan melalui proses hukum yang transparan. Hal ini memberi efek jera bagi upaya intimidasi sekaligus membangun standar kerja jurnalistik yang konsisten. Selain itu, keberadaan lembaga pengawas yang kredibel, mekanisme pengaduan publik, serta etika profesi yang mapan membantu menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab, sehingga pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa kehilangan kepercayaan publik (de la Fuente, 2022).

Namun demikian, kebebasan pers di negara maju tetap menghadapi tantangan baru yang bersifat lebih “tidak terlihat.” Konsentrasi kepemilikan media, tekanan komersial, dan fragmentasi audiens akibat platform digital dapat mengubah prioritas redaksi. Kejaran klik dan logika algoritmik berpotensi mendorong pemberitaan yang lebih sensasional, mempersempit ruang liputan investigatif yang mahal, atau meningkatkan bias karena media membidik segmen audiens tertentu. Dalam kondisi ini, kebebasan formal tetap ada, tetapi kualitas dan keberagaman informasi dapat melemah apabila media terlalu tunduk pada kepentingan pasar atau kepentingan pemilik. Oleh karena itu, evaluasi kebebasan pers perlu memasukkan dimensi ekonomi-politik media, bukan hanya indikator kebijakan pemerintah semata.

Di sisi lain, pada negara demokrasi berkembang, hambatan kebebasan pers sering muncul melalui kombinasi represi langsung dan kontrol tidak langsung. Represi langsung dapat berbentuk kriminalisasi, ancaman hukum, pembubaran liputan, atau kekerasan fisik yang menciptakan iklim takut. Sementara kontrol tidak langsung kerap terjadi melalui tekanan ekonomi: misalnya penempatan iklan pemerintah yang selektif, pemberian konsesi bisnis, atau “hukuman” berupa pemblokiran akses narasumber dan informasi. Strategi seperti ini mendorong sensor terselubung (self-censorship) karena redaksi memilih “aman” agar institusi media tetap bertahan (Vannuchi et al., 2025). Pada akhirnya, publik mungkin tetap menerima arus berita setiap hari, tetapi narasi yang kritis terhadap kekuasaan menjadi lebih jarang, lebih halus, atau dikemas secara ambigu.

Konteks sosial-politik juga berpengaruh besar. Dalam situasi polarisasi, konflik identitas, atau meningkatnya populisme, jurnalis sering menjadi sasaran delegitimasi dituduh berpihak, menyebarkan kebohongan, atau menjadi “musuh rakyat.” Delegitimasi seperti ini menurunkan kepercayaan publik terhadap media, sekaligus memberi pembenaran moral bagi tindakan represif. Ketika publik terpecah dan kepercayaan terhadap institusi melemah, pemerintah atau aktor politik non-negara dapat lebih mudah mengendalikan agenda melalui propaganda, buzzer, atau kampanye disinformasi di media sosial. Tantangan ini membuat kebebasan pers modern bukan hanya persoalan relasi pers versus negara, melainkan juga pers versus ekosistem informasi yang semakin kompleks.

Karena itu, penguatan kebebasan pers dalam demokrasi berkembang memerlukan pendekatan multidimensi: reformasi regulasi agar tidak membuka celah kriminalisasi, peningkatan keselamatan jurnalis, transparansi kepemilikan media, serta model bisnis yang mengurangi ketergantungan pada pendanaan politik. Pada saat yang sama, literasi media publik perlu diperkuat agar masyarakat mampu membedakan informasi kredibel dan propaganda. Jika kondisi-kondisi ini membaik, kebebasan pers dapat menjadi motor demokratisasi: memperkuat akuntabilitas, mendorong partisipasi warga yang lebih rasional, dan membantu institusi demokrasi bertahan dalam tekanan (De la Mata et al., 2024). Dengan demikian, hubungan kebebasan pers dan demokrasi benar-benar bersifat timbal balik: pers yang lebih bebas memperkuat demokrasi, sementara demokrasi yang lebih matang menyediakan perlindungan yang memungkinkan pers tetap bebas dan berfungsi efektif.

### 3. Peran Media Dalam Pemilu

Media memiliki peran penting dalam pemilihan umum di negara-negara demokrasi maju, berfungsi sebagai penyedia informasi sekaligus mendidik publik, sehingga secara signifikan memengaruhi perilaku pemilih. Media membentuk opini publik dengan menyediakan platform bagi kandidat untuk menyampaikan kebijakan mereka dan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi penting mengenai proses pemilihan (Smajlović & Čolakhodžić, 2023). Kemandirian media sangat penting agar pelaporan kampanye dapat berlangsung secara adil, tetapi sering menghadapi tantangan akibat kepemilikan media dan pengaruh keuangan yang dapat menimbulkan bias partisan (Hobbs, 2025). Analisis perbandingan menunjukkan bahwa pengaruh media berbeda-beda di berbagai konteks demokrasi, di mana media cetak secara tradisional membentuk persepsi pemilih melalui pelaporan mendalam dan selektif (Simma Appannamma, 2024). Perbedaan pengaruh ini dapat berdampak pada kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu, karena liputan yang bias atau kurang memadai dapat mengubah pemahaman publik dan tingkat keterlibatan dalam proses pemilihan (Thinnakkakath, 2025).

Selain sebagai penyedia informasi, media berperan sebagai “penjaga gerbang” (gatekeeper) yang menentukan isu mana yang dianggap penting selama masa kampanye. Melalui agenda setting, media dapat menonjolkan tema tertentu misalnya ekonomi, keamanan, atau korupsi yang kemudian menjadi acuan pemilih dalam menilai kandidat. Di negara demokrasi maju, praktik debat kandidat yang disiarkan luas, liputan cek fakta, serta jurnalisme data membantu publik menilai rekam jejak dan konsistensi program. Namun, di saat yang sama, kompetisi media dan dinamika platform digital dapat menggeser fokus dari substansi kebijakan ke aspek personal kandidat, kontroversi, atau politik gaya (style politics), sehingga kualitas deliberasi publik bisa menurun walau informasi melimpah.

Dalam konteks demokrasi berkembang, tantangan pemilu sering berkaitan dengan kesenjangan literasi media, kapasitas redaksi, serta penetrasi disinformasi yang lebih mudah memengaruhi kelompok rentan. Kecepatan penyebaran konten viral membuat framing yang keliru cepat membentuk persepsi pemilih sebelum klarifikasi muncul. Karena itu, integritas media pada masa pemilu tidak hanya ditentukan oleh netralitas, tetapi juga oleh kemampuan institusi media mengelola verifikasi, memberi konteks, dan menyajikan perbandingan program secara setara. Jika fungsi ini berjalan baik, media dapat meningkatkan partisipasi dan legitimasi hasil pemilu; jika tidak, media dapat memperuncing polarisasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokratis.

### 4. Kepemilikan dan Konsentrasi Media

Struktur kepemilikan media menunjukkan perbedaan yang mencolok antara negara demokrasi maju dan negara demokrasi berkembang, yang berdampak langsung pada independensi editorial dan kualitas informasi yang disampaikan. Di negara demokrasi maju, variasi bentuk kepemilikan meliputi media publik, swasta, dan komunitas mendorong keberagaman pandangan serta akuntabilitas. Contohnya dapat dilihat pada lembaga penyiaran publik seperti BBC dan PBS, yang berperan menjaga ketahanan demokrasi melalui otonomi editorial yang kuat (Benson et al., 2024). Sebaliknya, di banyak negara demokrasi berkembang, kepemilikan media sering terpusat pada konglomerat besar dan elit politik, yang melemahkan kebebasan pers serta meningkatkan risiko penyajian informasi yang bias. Pola konsentrasi kepemilikan semacam ini berkaitan dengan tata kelola yang

kurang baik dan hasil sosial yang negatif, karena media yang dikendalikan oleh negara cenderung membatasi hak-hak politik dan ekonomi. Analisis perbandingan menunjukkan bahwa struktur kepemilikan media memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas demokrasi; lingkungan media yang didominasi oleh sedikit pihak (oligopolistik) dapat mengancam transparansi dan keberagaman informasi, sehingga diperlukan reformasi regulasi untuk menciptakan sistem media yang lebih adil dan inklusif (Agarwal et al., 2023).

Kepemilikan media menentukan “batas tak terlihat” yang memengaruhi ruang redaksi: topik mana yang mudah diangkat, aktor mana yang lebih sering mendapat porsi pemberitaan, dan sejauh mana kritik terhadap kelompok tertentu ditoleransi. Di negara maju, meski konsentrasi kepemilikan tetap terjadi, biasanya terdapat mekanisme penyeimbang seperti regulasi antimonopoli, transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership), serta keberadaan media publik yang dapat menjadi rujukan informasi ketika media komersial sangat terpolarisasi. Model pendanaan media public walau tidak sempurna dapat membantu menjaga liputan isu layanan publik yang kurang menarik secara komersial tetapi penting secara demokratis.

Sebaliknya, di negara berkembang, konsentrasi kepemilikan sering beririsan langsung dengan kepentingan bisnis dan politik, sehingga media berpotensi menjadi instrumen negosiasi kekuasaan. Dampaknya bukan hanya bias isi, tetapi juga bias struktur: misalnya dominasi narasi tertentu, marginalisasi suara kelompok minoritas, dan menurunnya kualitas liputan investigatif karena risiko politik yang tinggi. Dalam jangka panjang, konsentrasi dapat melemahkan “pasar gagasan” (marketplace of ideas) karena publik tidak mendapat spektrum informasi yang memadai. Oleh sebab itu, reformasi yang relevan mencakup transparansi kepemilikan, aturan konflik kepentingan, dan dukungan ekosistem media lokal/komunitas agar keberagaman informasi lebih terjamin.

## 5. Hubungan antara Media dan Elit Politik

Hubungan antara media dan elit politik berbeda secara signifikan antara negara demokrasi maju dan negara yang sedang berkembang, yang berdampak pada kualitas demokrasi dan tingkat kepercayaan publik. Di negara demokrasi maju seperti Norwegia, media berperan sebagai pengawas yang menjaga transparansi dan akuntabilitas para pemimpin politik, meskipun sebagian pemimpin menunjukkan sikap skeptis terhadap peran media. Sementara itu, di negara berkembang seperti Indonesia, media sering beroperasi dalam pola hubungan patron-klien, di mana elit politik memengaruhi media melalui tekanan ekonomi untuk membentuk agenda pemberitaan sesuai dengan kepentingan mereka (Syah Putra, 2024). Kajian komparatif menunjukkan bahwa meskipun media dapat bertindak secara independen, dalam banyak kasus media justru menjadi alat legitimasi politik yang memengaruhi persepsi publik dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan (Karoulas, 2020). Dinamika ini menegaskan bahwa hubungan antara media dan elit politik bersifat kompleks, sehingga praktik media yang etis sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi (Hobbs, 2025).

Relasi media elit politik sering berjalan melalui pertukaran sumber daya: elit membutuhkan legitimasi dan akses publik, sementara media membutuhkan informasi, akses narasumber, dan stabilitas finansial. Di negara demokrasi maju, akses informasi biasanya lebih terlembagakan melalui konferensi pers, dokumen publik, dan prosedur formal, sehingga ketergantungan media pada “kedekatan personal” dengan elit relatif lebih kecil. Meski begitu, praktik “spin” politik tetap ada misalnya pengemasan pesan pemerintah agar menguntungkan citra tertentu sehingga media harus memiliki kapasitas editorial dan investigatif untuk tidak sekadar menjadi corong komunikasi politik.

Di negara berkembang, hubungan patron-klien membuat batas antara kepentingan publik dan kepentingan elit lebih kabur. Elit dapat memengaruhi isi melalui kepemilikan langsung, relasi bisnis, atau tekanan iklan, sementara media dapat “menukar” pemberitaan positif dengan akses atau perlindungan. Dalam situasi seperti ini, publik berisiko menerima informasi yang terlihat netral tetapi sesungguhnya telah melalui negosiasi kepentingan. Dampaknya tampak pada kepercayaan publik: ketika masyarakat menyadari kedekatan media dengan elit, skeptisisme meningkat dan ruang publik menjadi sinis. Karena itu, etika jurnalistik, transparansi konflik kepentingan, serta perlindungan independensi redaksi menjadi prasyarat penting agar relasi media elit tidak merusak integritas demokrasi.

## 6. Pola-Pola Struktural dalam Hubungan Media-Politik

Hubungan antara media dan politik menunjukkan pola yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di negara demokrasi maju, media umumnya berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap kekuasaan politik, membantu memperkuat transparansi dan memperdalam proses demokrasi (Syah Putra, 2024). Sebaliknya, di negara berkembang, hubungan yang bersifat klientelis lebih sering muncul, di mana media cenderung berpihak pada kepentingan politik dan ekonomi tertentu, sehingga mengurangi independensi dan efektivitasnya (Husain, 2023).

Kondisi ini berpengaruh terhadap sejauh mana media dapat memperkuat atau justru melemahkan demokrasi; media yang independen dapat menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas, sedangkan media yang bergantung pada kekuatan politik cenderung menghasilkan pemberitaan yang bias dan menurunkan kepercayaan masyarakat (Dragomir, 2025). Dengan demikian, hubungan antara regulasi media, kebebasan pers, dan tingkat kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam memahami peran media terhadap konsolidasi demokrasi di berbagai konteks politik (Kovalenko, 2021).

Pola struktural hubungan media-politik juga dipengaruhi oleh desain institusi: sistem pemilu, tingkat pluralisme partai, kekuatan masyarakat sipil, serta rezim regulasi media. Pada demokrasi maju, keberadaan checks and balances dan pengadilan yang relatif independen menciptakan biaya politik yang tinggi bagi pemerintah jika mencoba mengontrol media secara terang-terangan. Akibatnya, pengaruh politik lebih sering muncul melalui cara yang subtil misalnya pengaturan akses informasi, manajemen komunikasi pemerintah, atau tekanan opini public yang tetap harus dihadapi media dengan standar profesionalisme dan transparansi.

Dalam demokrasi berkembang, pola klientelisme sering diperkuat oleh lemahnya institusi penegakan hukum dan ketimpangan ekonomi, sehingga media rentan dijadikan alat mobilisasi dukungan atau delegitimasi lawan politik. Media dalam konteks ini dapat berfungsi ganda: sebagai aktor politik yang aktif (mendorong kandidat/partai tertentu) sekaligus sebagai arena pertarungan narasi antar-elit. Struktur digital memperumit pola ini karena aktor non-media seperti jaringan influencer, buzzer, atau akun anonym ikut menggeser produksi wacana politik. Oleh karena itu, memahami hubungan media politik perlu melihat ekosistem secara keseluruhan: regulasi yang adil, kebebasan pers yang terlindungi, keberagaman kepemilikan, serta literasi media publik. Kombinasi faktor tersebut menentukan apakah media menjadi pilar demokrasi atau justru memperkuat dominasi kelompok tertentu.

#### **7. Strategi Memperkuat Ekosistem Media Demokratis**

Membangun ekosistem media yang demokratis memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek regulasi dan pendidikan. Penguatan regulasi serta perlindungan terhadap kebebasan pers menjadi hal penting untuk mencegah ancaman seperti penyebaran informasi keliru dan intervensi politik yang dapat melemahkan independensi media serta menurunkan kepercayaan publik (Patnaik & Chauhan, 2024). Selain itu, pendidikan dan literasi media berperan dalam memberdayakan masyarakat agar mampu berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, sehingga tercipta pemilih yang sadar dan mampu membedakan antara sumber yang kredibel dan yang tidak dapat dipercaya (Nabirye H., 2025). Diversifikasi kepemilikan media serta dukungan terhadap media publik juga penting untuk memperluas keragaman suara dan pandangan, memastikan bahwa jurnalisme tetap berfokus pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan politik atau komersial tertentu (Prinzing, 2025).

Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan etika jurnalisme diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap media, karena penerapan standar etika dapat membantu mengurangi dampak polarisasi dan penyebaran misinformasi. Terakhir, pemanfaatan media digital sebagai ruang demokrasi baru membuka peluang bagi partisipasi dan keterlibatan publik yang lebih luas, yang berpotensi memperkuat kembali diskursus demokrasi di era modern

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: Hubungan antara media dan politik merupakan elemen fundamental dalam membentuk kualitas demokrasi di berbagai negara. Perbandingan antara negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa perbedaan dalam stabilitas politik, kebebasan pers, dan struktur kepemilikan media berpengaruh langsung terhadap sejauh mana media dapat menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi publik secara independen. Di negara demokrasi maju, media berperan sebagai pengawas kekuasaan yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas politik, sementara di negara berkembang, media kerap menghadapi kendala berupa tekanan politik, konsentrasi kepemilikan, serta lemahnya regulasi yang mendukung kebebasan pers. Selain itu, pola hubungan antara media dan elit politik turut menentukan arah pemberitaan dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Media yang bebas dan profesional mampu mendorong partisipasi politik masyarakat, memperkuat proses pemilihan umum, serta menjaga stabilitas demokrasi melalui penyebaran informasi yang objektif dan berimbang. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekosistem media yang ada di suatu negara. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya.

## Referensi

1. Agarwal, L., Priti, Jaiswal, S., & Kumar, S. (2023). Media ownership and its influence on political reporting. *Journal of Nonlinear Analysis and Optimization*, 13(01), 78–86. <https://doi.org/10.36893/JNAO.2022.V13I02.078-086>
2. Aminah, S. (2021). Politik Media, Demokrasi, dan Media Politik. *Jurnal Universitas Airlangga*, 19(3), 35–46. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/POLITIK MEDIA, DEMOKRASI.pdf>
3. Arsyad, A., Dzaljad, R. G., Nurmianani, M., Rantona, S., Komunikasi, P. I., Muhammadiyah, U., & Hamka, P. (2024). Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik : Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik Dinamika Komunikasi Politik dalam Era Media Sosial : Peran Platform Digital dalam Pembentukan Opini Publik , " mengeksplorasi peran penting yang dimainkan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosia*, 2(2), 1–12.
4. Benson, R., Hessérus, M., Neff, T., & Sedel, J. (2024). Public Service Orientation in Action. In *How Media Ownership Matters* (pp. 113–125). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199931293.003.0006>
5. Bulya, B., & Izzati, S. (2024). Indonesia's Digital Literacy as a Challenge for Democracy in the Digital Age. *The Journal of Society and Media*, 8(2), 640–661. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p640-661>
6. de la Fuente, E. (2022). Limiting media freedom in democratic states [maastricht university]. <https://doi.org/10.26481/dis.20220624ef>
7. De la Mata, D. Á. C., Guede, J. R. S., & Sebastián, M. G. de B. (2024). Hallin and Mancini: Two Decades of Influence in Politics and Communications. *Media and Communication*, 12. <https://doi.org/10.17645/mac.7695>
8. Dragomir, M. (2025). State Media. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.1486>
9. Hobbs, M. J. (2025). Politics and Media. In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology* (pp. 1–9). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosp044.pub2>
10. Humprecht, E., Castro Herrero, L., Blassnig, S., Brüggemann, M., & Engesser, S. (2022). Correction to: Media Systems in the Digital Age: An Empirical Comparison of 30 Countries. *Journal of Communication*, 72(3), 449–449. <https://doi.org/10.1093/joc/jqac010>
11. Husain, S. (2023). Power Politics and Media: An Understanding of Their Interplay. *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, 8(8), 61–67. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2023.v08.n08.012>
12. Irfan Haikal, C., Novitasari, D., & Fajar Hertantyo, R. (2024). Konsentrasi Kepemilikan Media di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. *LENVARI: Jurnal of Social Science*, 2(2), 94–101. <https://doi.org/10.61105/jss.v2i2.137>
13. Irsyahma, A. Y., & Lestari, D. P. (2024). Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Pers. *Indonesian Research Kournal On Education*, 4, 1–7.
14. Karoulas, G. (2020). Political Elites and Media in Greece: Publicity as an Electoral Factor for Political Personnel. In *The Emerald Handbook of Digital Media in Greece* (pp. 259–273). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-400-520201050>
15. Kovalenko, I. (2021). Freedom of the press and democracy. *Вісник Книжкової Палати*, 9, 26–30. [https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.9\(302\).26-30](https://doi.org/10.36273/2076-9555.2021.9(302).26-30)
16. Lindvall, J. (2025). 14. The Media. In *An Introduction to Comparative Politics* (pp. 245–261). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780192896605.003.0014>
17. Melati, Nurdin, M., & Putri, V. A. (2024). Demokratisasi dan Media Massa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1).
18. Nabirye H., K. (2025). The Future of News Media: Trust and Credibility. *IDOSR JOURNAL OF COMMUNICATION AND ENGLISH*, 10(1), 64–68. <https://doi.org/10.59298/IDOSR/JCE/101.6468.20250000>
19. Nasution, S., & Suhairi. (2023). Strategi Manajemen Ekonomi Dalam Menghadapi Tantangan Global. *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi ...*, 2(5). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musyitarineraca/article/view/1138>
20. Patnaik, U., & Chauhan, A. S. (2024). Derailing of Fourth Pillar of the Democracy and Future of Accountable , Transparent Democratic System. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 6(2), 1–8.
21. Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). “Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif.” *Teknik Lokal* (2024). *Local Engineering*, 2(2), 50–58. <https://doi.org/10.59810/localengineering>

23. Prinzing, M. (2025). Medialer Public Service als Garant für Demokratie? Sechs Wegmarken für eine Mediengesellschaft mit Zukunft – ein Essay. *Medien & Kommunikationswissenschaft*, 73(2), 195–213. <https://doi.org/10.5771/1615-634X-2025-2-195>
24. Ritonga, R. S. (2023). Media dan Politik. *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 64–89. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol>
25. Shi, H. (2023). The mutual influence between politics and media. *Advances in Education, Humanities and Social Science Research*, 6(1), 466. <https://doi.org/10.56028/aehtsr.6.1.466.2023>
26. Simma Appannamma. (2024). THE IMPACT OF THE PRINT MEDIA ON VOTER BEHAVIOUR. *International Education and Research Journal*, 10(6). <https://doi.org/10.21276/IERJ24405781147561>
27. Smajlović, H., & Čolakhodžić, F. (2023). How Does Media Coverage Affect the Outcomes of the Elections? *MAP Social Sciences*, 4(1), 109–123. <https://doi.org/10.53880/2744-2454.2023.4.109>
29. Suhardi, A. J. (2025). Demokrasi Ala Cukong Negara Bisa Apa? In AMU Press.
30. Syah Putra, D. K. (2024). Power Relations between Media and Politics in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 5(2), 143–152. <https://doi.org/10.15408/jisi.v5i2.41184>
31. Thinnakkakath, G. (2025). Fake News, Propaganda, and Other Influences on Elections. In *Impacts of Leakage, Whistleblowing, and the Rise of Propaganda* (pp. 139–158). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7468-9.ch007>
32. Vannuchi, C., Lima, J. G. de, & Gasparian, T. (2025). Cala a boca, jornalista: intimidação e desinformação como políticas de Estado. *Estudos Avançados*, 39(113). <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.202539113.018>
33. Yunus, A. M. A., & Ardiansyah, M. (2024). *Ekonomi Politik. K-Media*.